

PENOLAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN EKSTRADISI FETHULLAH GULEN OLEH TURKI

**Muhammad Alvin Fazrien¹
NIM. 1402045004**

Abstract

The extradition issue between United States of America and Republic of Turkey over Fethullah Gulen is a political issue between these two nations, therefore the political issue has made the normative extradition progress goes unlikely as the results. The purpose of this research is to explain about the United States reasonable background of the rejection to the Turkey's extradition request. This research use qualitative descriptive as the method of research. The data's sources of this research are mainly from scientific literature, journals, websites and some other trusted sources. The author uses extradition and rational choice as the concept. The result shows that the extradition issue between United States and Turkey over Fethullah Gulen is a political matter between these two nations. Therefore, the unconsolidated interest between two countries has made the normative extradition progress goes unlikely. United states role as The Requested State Party claimed that Turkey's extradition request over Fethullah Gulen is politicaly patterned, so that claim made Turkey's extradition request broke the extradition agreements between two nations that stated in Article -3 no.1. However, United States are not yet organize The Political incident Test in order to prove and to legitimate Gulen's status wether he is a political offenders or not.

Keywords : *Extradition, Fethullah Gulen, United States, Turkey.*

Pendahuluan

Sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, pemerintahan negara ini kerap mengalami intervensi hingga aksi kudeta oleh pihak Militer Turki. Ini disebabkan oleh Militer-Birokrat *Kemalist* berhaluan sekuler yang tergabung dalam Partai CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi*) merupakan instrumen penguasa sejak berdirinya Republik Turki, setidaknya hingga diberlakukannya sistem multi partai pada tahun 1950. Pemilu multi partai tahun 1950 dapat dianggap psebagai suatu momentum kebangkitan aliran politik Islam di Turki. Pada Pemilu tahun tersebut dimenangkan oleh *Democratic Party* (PD) yang berhaluan Islamis. Dengan demikian, PD menunjuk Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri Turki. Namun kebijakan-kebijakan dan gaya kepemimpinan Islamis Menderes berujung pada aksi kudeta militer Turki pada tahun 1961. Kudeta tersebut berujung pada hukum gantung terhadap Adnan Menderes dan beberapa anggota kabinetnya. Sejak saat itu, Militer Turki yang terafiliasi dengan Partai CHP ini, kerap kali melancarkan intervensi bahkan berujung pada kudeta terhadap pemerintahan berhaluan Islam. Terhitung sejak tahun 1961 hingga 2016, Militer Turki berhasil menjatuhkan pemerintahan yang dinilai berhaluan Islam dan dianggap sebagai ancaman terhadap nilai sekularisme Turki yang merupakan cita-cita pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Keberhasilan intervensi Militer dalam menumbangkan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alvnfazrien@gmail.com

pemerintahan berhaluan Islam yaitu pada era Pemerintahan Adnan Menderes(1961), Turgut Orzal(1980), Necmettin Erbakan(1997).

(Fabio Viccini, 2014)

Namun pada tahun 2016 militer mengalami kegagalan atas upayanya meng kudeta Pemerintahan Turki dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Namun, gagalnya upaya kudeta oleh sebagian faksi Militer Turki yang dipimpin oleh Jenderal Akin Ozturk ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melancarkan aksi penangkapan massal, penutupan sentra bisnis serta pencopotan pejabat publik yang dikenal sebagai *The Purge*

The Purge berakibat pada ditangkapnya 150.348 orang yang dianggap terlibat dalam aksi kudeta 15 Juli 2016. Berbagai pihak termasuk pemimpin negara Uni-Eropa seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte hingga Sekretaris Negara Amerika Serikat John Kerry menganggap penangkapan berskala massif ini bersifat politis, sebab tanpa melalui pembuktian dan legalitas yang jelas, serta dianggap sebagai justifikasi untuk melemahkan lawan politik dan pihak-pihak yang bertentangan terhadap pemerintah. Kemudian *The Purge* berujung pada dituduhnya seorang ulama berpengaruh Turki yang sejak tahun 1999 berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat yaitu Fethullah Gulen. Gulen dituduh sebagai aktor intelektual dibalik upaya kudeta 15 Juli 2016. Namun Gulen menyangkal segala tuduhan yang disematkan oleh Pemerintah Turki kepadanya.

Sosok Fethullah Gulen yang dituduh sebagai aktor intelektual upaya kudeta ini memiliki pengaruh cukup kuat di Turki sehingga ia mampu membantu seorang Recep Tayyip Erdogan dan Partai AKP sebagai pemenang suara mayoritas Pemilu Turki pada tahun 2002, kemenangan tersebut membuat Erdogan sebagai Perdana Menteri. Dalam hal ini Gulen berperan sebagai kantung suara Partai AKP melalui jaringan *Gülenist*, yaitu para pengikut Fethullah Gulen serta afiliasi bisnisnya.

(Rabasa, Angel dan Stephen F.Larabee, 2008.)

Aliansi Partai AKP dan *Gülenist* menghasilkan pemerintahan yang relatif stabil jika dibandingkan pada pemerintahan berhaluan Islam sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh luasnya jaringan Gulen yang tergabung dalam berbagai kelas sosial karena aktifitas pergerakannya yang meliputi berbagai lini kehidupan di Turki. Hal tersebut sangat berdampak bagi stabilitas pemerintahan, terlebih *Gülenist* mendapatkan porsi jabatan dalam aliansi di sektor yudikatif serta penegakan hukum seperti kepolisian.

(www.theguardian.com : Turkey's Request Extradition over Fethullah Gulen)

Namun aliansi tersebut mulai renggang ketika terjadi perbedaan pendapat antara Fethullah Gulen dan pemerintah mengenai perlakuan represif pemerintah terhadap demonstran insiden *Taksim Gezi Park* pada Mei 2013. Puncaknya pada 17 Desember 2013, ketika seorang Jaksa Senior Turki Muammer Akkas dan Kepala Kepolisian Istanbul Husseyin Capkin yang diyakini pemerintah merupakan *Gülenist*, berhasil membongkar skandal kasus korupsi Partai AKP yang melibatkan 2 anak Erdogan yaitu Bilal dan Burak Erdogan.

Pemerintah Turki juga mengklaim bahwa Fethullah Gulen telah mengerahkan pendukungnya yang berada di sektor kepolisian, yudikatif dan militer sebanyak kurang lebih 10.000 orang untuk melancarkan aksi kudeta 15 Juli 2016.

Berdasarkan tuduhan tersebut Pemerintah Turki telah meminta proses ekstradisi Fethullah Gulen kepada Amerika Serikat pada 22 Juli 2016 untuk diadili atas alasan Permintaan ekstradisi Turki atas Gulen telah dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 23 Agustus 2016. Permintaan ekstradisi oleh Turki tersebut didasari oleh perjanjian ekstradisi antara Turki dan Amerika Serikat pada tahun 1981.

(Sarah El-Kazaz, 2015.)

Barack Obama, Presiden Amerika Serikat pada saat itu merespon dengan mengatakan bahwa Turki harus memberikan bukti yang jelas akan tindak kriminal yang telah dilakukan oleh Fethullah Gulen. Selain karena bukti yang kurang melalui Sekertaris Negara Amerika Serikat, John Kerry berpendapat bahwa Pemerintahan Erdogan tengah memanfaatkan aksi kudeta sebagai justifikasi menyingkirkan lawan politik Partai AKP.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Ekstradisi

Secara umum ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang jelas memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya. Dengan demikian, ekstradisi dapat dijadikan dasar sebagai sarana kerja sama internasional mencegah dan memberantas kejahatan.

(J.G Starke, 1989)

Ekstradisi menurut J.G Starke mengenai perjanjian ekstradisi bahwa ekstradisi merupakan proses dimana menurut traktat atau atas suatu dasar timbal balik suatu negara menyerahkan kepada negara yang lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum atas tindakan kriminal yang melanggar hukum negara yang meminta itu karena negara yang meminta itu berkompoten untuk mengadili sang tertuduh tersebut.

Terkait definisi ekstradisi adapun beberapa unsur-unsur yang menjelaskan mengenai ekstradisi secara lebih spesifik yaitu:

1. Unsur Subjek, yang dimaksud mengenai unsur subjek ialah kedua negara yaitu negara peminta dan negara yang diminta perihal ekstradisi. Dalam hal ini ada subjek “negara peminta” (*The Requesting State*) dan “negara yang diminta” (*The Requested State*), “negara peminta” adalah subjek yang memiliki kepentingan dan kapasitas untuk mengadili tersangka tindak kriminal sedangkan subjek “negara yang diminta” (*The Requested State*) adalah negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) itu berada atau bersembunyi, negara ini dimintai oleh negara-negara yang memiliki yurisdiksi yaitu “negara peminta” agar menyerahkan orang yang berada dalam wilayahnya
2. Unsur Objek, Unsur objek merupakan si pelaku yang telah tertuduh,tersangka,terdakwa oleh negara peminta.
3. Penolakan ekstradisi karena ada sangkaan yang cukup kuat, permintaan ekstradisi *ditolak jika menurut subjek “negara yang diminta” terdapat sangkaan yang cukup kuat*, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan

dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik atau karena ia termasuk ke pada sukubangsa atau golongan tertentu. dengan agamanya, keyakinan politiknya atau kewarganegaraannya ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu

4. Permintaan yang ditunda pemenuhannya, ialah subjek “negara yang diminta” memiliki kapasitas untuk menunda ekstradisi atau bahkan tidak melakukan ekstradisi apabila kejahatan si tertuduh/tersangka/terdakwa dinilai oleh “negara yang diminta” adalah kejahatan politik. (M. Budiarto, 1980)

Melalui konsep ekstradisi, dapat diketahui bahwa ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan suatu traktat maupun perjanjian dan adanya posisi ”negara peminta” dan “negara yang diminta”. Dalam kasus ekstradisi Fethullah Gulen yang menyangkut Amerika Serikat adalah sebagai “negara yang diminta” dan Turki adalah sebagai “negara peminta”, dan hal tersebut berdasarkan pada perjanjian ekstradisi antara AS dan Turki yang telah disepakati pada tahun 1981.

Teori Pilihan Rasional

Dalam perpolitikan internasional negara merupakan sebuah aktor yang rasional yang berarti setiap kebijakan yang di ambil adalah pilihan yang rasional dan menguntungkan bagi kepentingan negaranya. Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara adalah produk dari hasil pertimbangan untung dan ruginya terhadap hasil kebijakan tersebut. Teori Pilihan Rasional sendiri merupakan instrumen mengenai maksud arah tujuan aktor dalam kebijakannya.

Sedangkan menurut Stephen Waltz Teori Pilhan Rasional berasumsi bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil suatu aktor adalah untuk memaksimalkan manfaat akan hasil dari pilihan tersebut. Aktor akan memilih pilihan yang akan menghasilkan manfaat yang terbaik bagi aktor tersebut. Teori Pilihan Rasional menurut Waltz adalah untuk menjawab alasan kesimpulan logis sang aktor dalam memilih suatu kebijakan. Teori pilihan rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjawab mengenai preferensi keputusan terbaik suatu negara dalam dunia internasional.

(Jackson, Robert & Geor Sorenson, 2009)

Pemikiran dasar teori pilhan rasional adalah bahwa aktor memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan aktor tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap (aktor tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan daripada C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, potensi dan keuntungan dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik.

Teori pilihan rasionalis berpusat pada kajian aksi yang dilatarbelakangi oleh motif tertentu, sehingga aktor yang melakukan kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai variabel dari lingkungan pembentuk pemikiran rasionalnya. Aktor dalam konteks ini adalah negara, yang mana mengutamakan survivalitas dan kesejahteraan dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diberlakukan. Terdapat beberapa indikator penting dalam teori pilihan rasional yang dapat dijadikan dasar analisis menuju bukti penelitian.

Yang pertama adalah *power determinism*, bahwa aktor dalam politik internasional memiliki kesamaan motif dalam melakukan tindakan yakni eksistensi dan pencapaian kebutuhan, kemudian motif tersebut didukung dengan kalkulasi *power* yang dimiliki oleh aktor tersebut sehingga memunculkan dinamika antarnegara yang menimbulkan kondisi kooperatif atau konflik. Indikator kedua dalam pendekatan rasionalitas adalah *power activation*, yang mengarah pada *power* yang memberikan limitasi pada opsi tindakan yang dapat ditempuh suatu negara, namun bukan sebagai determinasi utama. Sehingga maksimalisasi *power* menjadi agenda penting bagi setiap negara dalam mengamankan negaranya dan mampu menyediakan kapabilitas ofensif dalam beberapa pilihan. Pada intinya, *power* dapat digunakan untuk memprediksi persepsi aktor dalam konstelasi hubungan internasional.

Teori pilihan rasional digunakan untuk menganalisa mengenai alasan penolakan Amerika Serikat terhadap permintaan ekstradisi Fethullah Gulen oleh Pemerintah Turki dimana Amerika Serikat adalah aktor rasional dalam konstelasi hubungan internasional dengan kebijakannya yang mampu menciptakan kondisi kooperatif ataupun konflik melalui kebijakannya.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat tidak memenuhi permintaan Turki mengekstradisi Fethullah Gulen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif yang bersifat tulisan-tulisan dan karya ilmiah yang dianalisa oleh penulis sebagai sumber informasi dan referensi penelitian.

Hasil Penelitian

Meskipun upaya kudeta 15 Juli 2016 oleh faksi militer yang tergabung dalam *Peace at Home Council* terhadap Pemerintahan Erdogan mengalami kegagalan. Namun peristiwa tersebut tetap menjadi suatu insiden yang menyebabkan kekacauan, instabilitas politik, korban jiwa yang banyak serta respon balasan yang berlebihan dari Pemerintahan Erdogan yang dikenal dengan aksi *The Purge*. Pasca terjadinya aksi kudeta 15 Juli 2016 di Turki, Pemerintah Turki merespon aksi tersebut dengan penangkapan dan pemecatan pihak-pihak yang terindikasi dalam aksi kudeta secara massif. Selain terjadinya penangkapan dan pemecatan di sektor publik secara masal *The Purge* berujung pada dituduhnya Fethullah Gulen sebagai aktor intelektual upaya kudeta 15 Juli 2016.

Upaya Kudeta 15 Juli 2016

Turki merupakan negara yang cenderung sering mengalami aksi kudeta oleh pihak militer. Sejak terbentuknya Republik Turki negara tersebut telah mengalami 4 kali upaya kudeta militer pada pemerintah. Namun pada 15 Juli 2016 upaya kudeta terhadap Pemerintahan Erdogan faksi militer yang tergabung dalam *Peace at Home Council* mengalami kegagalan. Meskipun mengalami kegagalan, insiden tersebut telah menimbulkan kasualitas yang terparah sepanjang sejarah Republik Turki.

Aksi kudeta yang terjadi pada 15 Juli 2016 disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat digambarkan melalui latar belakang doktrin Militer Turki serta berbagai perselisihan yang terjadi antara Militer dan AKP. Militer Turki secara doktrin merupakan penjaga

prinsip sekularisme yang digagas oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan Militer Turki cenderung akan melakukan intervensi politik dan bahkan kudeta militer jika Turki dianggap keluar dari nilai-nilai sekularisme. Hal tersebut dapat terlihat ketika Militer Turki meng kudeta Pemerintahan Adnan Menderes yang merupakan seorang Konservatif Islamis dari *Democratic Party* pada tahun 1960, lalu Pemerintahan Turgut Ozal yang mengusung paham *Neo-Ottoman* pada tahun 1980, serta Pemerintahan Necmettin Erbakan dari *Welfare Party* pada tahun 1997.

Ketika berlangsungnya upaya kudeta terhadap Pemerintahan Erdogan pada 15 Juli 2016, Erdogan sedang berada di kota Marmaris bersama keluarga dalam rangka berlibur. Pada pukul 21.30 waktu setempat sampai dengan 22.00 Erdogan menerima berbagai laporan melalui telepon mengenai pengerahan jet tempur dan kekuatan militer lainnya di Istanbul dan penutupan Jembatan Bosphorus oleh faksi militer. Mengetahui adanya aksi kudeta melalui Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım, Pemerintah Turki menyatakan bahwa Turki sedang berada dalam aksi percobaan kudeta oleh faksi militer. Erdogan bereaksi dengan menginstruksikan tim keamanan Presiden untuk merelokasi dirinya beserta keluarga menuju kota Dalaman untuk terbang ke Istanbul. Faksi militer yang mengetahui lokasi hotel kediaman Erdogan di Marmaris pada dini hari 15 Juli mengerahkan jet tempur yang menewaskan 2 anggota tim keamanan Presiden dan 25 orang terluka, namun pada saat terjadinya serangan Presiden Erdogan telah berhasil direlokasi menuju wilayah Dalaman dan pada saat itu ia telah berada di pesawat menuju Istanbul.

(Rabasa, Angel dan Stephen F. Larrabee 2008)

Pasca terjadinya aksi kudeta 15 Juli 2016, Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım menyerukan agar rakyat Turki tidak melakukan pembalasan dan persekusi terhadap siapapun yang ada dibalik kudeta tersebut, namun ia dan pemerintahannya akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kudeta. Kudeta yang dilakukan oleh militer pada 15 Juli 2016 tersebut merupakan suatu momentum bagi Pemerintahan AKP di Turki untuk membersihkan berbagai sektor di Turki dari pengaruh-pengaruh pihak yang berpotensi menghambat kekuasaan AKP di Turki. Sejak terjadinya kudeta Pemerintah Turki terlihat sangat eksplisit melakukan upaya untuk menghapuskan pengaruh Fethullah Gulen serta pengikutnya di Turki, hal tersebut diakui oleh pejabat Badan Intelijen Turki (MIT).

Setelah 7 hari pasca terjadinya aksi kudeta yaitu pada tanggal 22 Juli 2016 Pemerintah Turki memberlakukan *state of emergency* di seluruh wilayah Turki, hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk menangkap siapa saja pihak yang diduga sebagai teroris ataupun dalam hal ini yang diduga berkontribusi dalam aksi kudeta. Beberapa minggu kemudian Pengadilan Turki mengumumkan lebih dari 150.000 surat penangkapan terkait jaringan *Gülenist*, dari puluhan ribu tersebut terdiri pejabat kepolisian, militer, pilot, akademisi dan pejabat publik. Mereka yang ditangkap segera dipecah dari instansi mereka bekerja hanya berdasarkan tuduhan mereka sebagai jaringan *Gülenist*, selain itu terdapat kejanggalan atas kematian 58 orang yang ditahan di penjara selama proses *The Purge* berlangsung. Adanya status *State of emergency* pasca kudeta dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menghapus pemilihan rektor universitas, rektor universitas bahkan dipilih langsung oleh Erdogan.

Masifnya jumlah penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, banyak pihak akademisi, jurnalis serta masyarakat sipil yang mempertanyakan apa yang menjadi indikator bagi pemerintah mengenai penangkapan atas pihak-pihak yang ditahan dengan tuduhan sebagai bagian dari *Gülenist*, sebagai justifikasi seorang pejabat Turki menjawab persoalan tersebut dengan pernyataan bahwa pihaknya telah menyelidiki hal tersebut selama 2 tahun. Aksi *The Purge* menimbulkan kontroversi atas adanya motif politik dan kurangnya dasar bukti. *The Purge* juga berujung pada penetapan *Gülenist* dan afiliasinya sebagai organisasi terlarang serta Pemerintah Turki meminta diekstradisinya Fethullah Gulen dari Amerika Serikat. Fethullah Gulen dituduh sebagai aktor dibalik upaya kudeta militer 15 Juli 2016.

Profil Fethullah Gulen dan Pergerakannya

Muhammad Fethullah Gulen atau lebih dikenal dengan sebutan Hocaefendi bagi pengikutnya merupakan seorang ulama berpengaruh di Turki yang lahir di Pasinler, Erzurum, Turki pada 27 April 1941, ibunya adalah seorang pengajar al-Quran dan ayahnya adalah seorang imam di desa tempat ia tinggal. Fethullah Gulen merupakan sosok ulama berfaham sufi, ajaran sufi atau sufisme adalah cabang ajaran dari Islam yang berkembang pada abad ke-8, sufisme merupakan suatu ajaran yang berangkat dari pertanyaan bagaimana cara untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlaq dan bertujuan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Fethullah Gulen secara aktif terlibat dalam diskusi atau perdebatan publik mengenai masa depan Turki, masa depan dunia islam dan toleransi antar umat beragama yaitu Gulen aktif melakukan diskusi antar agama dengan pemuka agama yahudi dan nasrani. Fethullah Gulen diperkirakan memiliki pengikut sebanyak 3-6 juta, yang disebut Hizmet ataupun Gulenist. Gulenist berkontribusi dalam menyebarkan pandangan Gulen mengenai toleransi melalui yayasan yang didirikan oleh Gulen yaitu Golden Generation yang menaungi institusi pendidikan serta perusahaan media massa yang dimiliki oleh jaringan pengikutnya yang berjumlah lebih dari 1000 institusi pendidikan diseluruh dunia, selain institusi pendidikan jaringan Gulen juga memiliki media massa yaitu zaman, bugun, millet dan Samanyolu TV.

(www.internationalschoolofsufism.com : The Origin of The School of Sufism)

Pada tahun 1970-1980an, gerakan Hizmet atau Gulenist mengembangkan suatu pemikiran yang berdasarkan ajaran sufi yang merupakan ajaran islam tradisionalis yang di temukan oleh Bediuzzaman Said i-Nursi, dimana pemikiran tersebut berkembang menjadi suatu gerakan sosial sebagai “jalan tengah” antara kaum sekularisme yang sedang berkuasa dan kaum agamis konservatif di Turki, pemikiran ini menjadikan gerakan Gulenist banyak di ikuti oleh masyarakat Turki.

Berkuasanya kaum sekuler di Turki dan melemahnya pengaruh Gulenist di Turki serta di bubarkannya Partai Refah, menjadikan hal tersebut sebagai momentum konsolidasi bagi para oposisi kaum sekuler, Necmettin Erbakan membuat suatu gerakan sosial baru yaitu Fazilet. Gerakan Fazilet bekerja sebagai kantong suara Partai AKP pimpinan Erdogan dan Abdullah Gul, Fazilet sukses mengantarkan Erdogan sebagai Walikota Istanbul dan mempopulerkan Erdogan sebagai politisi pembawa nilai-nilai Islam. Pada tahun 2002 Partai AKP dan Gulenist keluar dari aliansi Fazilet dan sepakat menepikan berbagai perbedaan pendapat dan menjadi suatu aliansi baru dalam Pemilihan Umum di Turki melawan Partai Welfare, partai baru bentukan Necmettin Erbakan. Partai AKP yang didukung oleh Gulenist, mampu memenangkan 2/3 kursi Parlemen Turki, secara

langsung hal tersebut menjadikan Erdogan yang merupakan pimpinan Partai AKP sebagai Perdana Menteri Turki.

(Fabio Viccini, 2014)

Gulenist yang merupakan kontributor utama pemenangan Partai AKP mendapatkan porsi kekuasaan di sektor Kepolisian dan Yudisial, dimana hal tersebut telah lama diincar oleh Gulenist yang bercita-cita untuk mereformasi sistem hukum di Turki. Aliansi Erdogan dan Fethullah Gulen menjadikan Fethullah Gulen sebagai orang terkuat ke-2 di Turki, kekuatan koneksi Gulenist dimanfaatkan oleh Erdogan untuk menjalankan Pemerintah Turki dimana dalam hal ini Erdogan memanfaatkan aristokrat-aristokrat yang tergabung dalam Gulenist lalu juga Erdogan memanfaatkan aliansi tersebut untuk menjauhkan militer Turki dari politik di Turki yang merupakan agenda utama Partai AKP.

Aliansi kuat antara Partai AKP dan Gulenist yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade tersebut mulai renggang ketika sikap para Gulenist mulai mengkritisi jalannya pemerintahan yang mulai bersifat otoriter. Pada tahun 2012, Gulenist mengkritisi pendekatan yang diambil oleh pemerintah kepada kelompok Kurdi, lalu pada tahun yang sama ketika terjadi aksi protes yang dikenal dengan sebutan Taksim Gezi Park Protest, dalam hal ini Gulenist yang berada di sektor yudisial mengkritisi pemerintah yang mengambil tindakan represif terhadap para demonstran yang menimbulkan 22 korban jiwa dan 134 orang ditangkap.

Respon dari Pemerintahan Erdogan mengenai perihal kritik oleh Gulenist Pemerintah menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan jaringan Gulenist lalu titik puncak daripada perseteruan Gulenist dan Partai AKP adalah pada tahun 2013 ketika sektor yudisial yang merupakan sektor para Gulenist dalam pemerintahan mampu mengungkap skandal korupsi yang melibatkan Bilal dan Burak Erdogan serta pebisnis yang berafiliasi dengan Partai AKP.

Aliansi antara AKP dan *Gulenist* yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade tersebut mulai terlihat tidak solid ketika terjadi perbedaan sikap antara *Gulenist* dan AKP. Awal mula keretakan aliansi tersebut adalah ketika *Gulenist* mulai mengkritisi jalannya pemerintahan yang mulai bersifat otoriter yang ditandai dengan kerasnya respon pemerintah terhadap demonstran *Taksim Gezi Park Protest*, tindakan represif pemerintah terhadap Suku Kurdi serta pengungkapan skandal korupsi AKP senilai 100 miliar *USD* yang digagas oleh *Gulenist* yaitu Muammer Akkas seorang Jaksa Senior Turki dan Huseyin Capkin seorang Kepala Kepolisian Istanbul.

Taksim Gezi Park Protest merupakan suatu kejadian yang mengawali retaknya hubungan AKP-*Gulenist*. Awal mula aksi protes tersebut sebenarnya hanyalah aksi protes oleh aktivis lingkungan yang menentang rencana Pemerintah Turki mengalihfungsikan Taman Gezi yang bersejarah sebagai replika barak militer secara sepihak tanpa konsultasi dan mendengarkan aspirasi publik. Namun aksi protes yang berawal sebagai protes aktivis lingkungan tersebut berkembang menjadi sebuah protes penuntutan hak-hak demokrasi dikarenakan kerasnya respon Pemerintah terhadap para demonstran. Pemerintah menginstruksikan kepolisian untuk menembakkan gas air mata serta Pemerintah Turki melakukan pemblokiran terhadap situs-situs media sosial seperti *Youtube*, *Instagram* dan *Twitter*. Aksi yang telah berkembang menjadi tuntutan terhadap demokrasi tersebut diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari

Serikat Buruh, Persatuan Arsitek Turki dan masyarakat sipil lainnya. Fethullah Gulen menganggap respon pemerintah tersebut terlalu berlebihan dan hal tersebut baginya menandai matinya demokrasi di Turki.

Kritik oleh *Gulenist* direspon Pemerintah Turki dengan menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan jaringan *Gulenist* lalu titik puncak daripada perseteruan *Gulenist* dan AKP adalah pada tahun 2013 ketika *Gulenist* mengungkap skandal korupsi AKP senilai 100 miliar USD. Skandal korupsi tersebut juga melibatkan Bilal dan Burak Erdogan, anak dari Recep Tayyip Erdogan. Pengungkapan skandal korupsi tersebut digagas oleh *Gulenist* yaitu Muammer Akkas (Jaksa Senior Turki) dan Huseyin Capkin (Kepala Kepolisian Istanbul).

Pada tanggal 17 Desember 2013 Kepolisian Turki menangkap 47 orang yang merupakan pejabat publik, pengusaha yang berafiliasi dengan AKP untuk mengungkap skandal korupsi AKP. Selain 47 orang yang merupakan pejabat publik dan pengusaha, kepolisian juga turut menangkap 3 orang anak menteri dalam Kabinet Pemerintahan AKP yaitu Baris Guler anak dari Muammer Guler (Menteri Dalam Negeri), Kaan Caglayan anak dari Zafer Caglayan (Menteri Ekonomi) serta Oguz Bayraktar anak dari Erdogan Bayraktar (Menteri Lingkungan Hidup dan Perencanaan Urban).

(www.bbcnews.com : *Turkish Corruption Probe Row Deepens*)

Setelah penangkapan 47 tersangka tersebut kepolisian Turki mengumumkan akan menangkap Bilal dan Burak Erdogan. Menanggapi hal tersebut pada 7 Januari 2014 Pemerintah Turki melakukan pemecatan massal di Kepolisian Turki dengan memecat 350 petugas polisi termasuk Huseyin Capkin serta dimutasinya Muammer Akkas. Fethullah Gulen menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa Erdogan sedang melakukan pembersihan musuh politik di kalangan pejabat sipil, sedangkan Erdogan beranggapan bahwa pengungkapan skandal tersebut merupakan suatu kudeta melalui sektor yudisial oleh orang-orang yang iri terhadap pemerintahannya.

Kritik *Gulenist* atas kekerasan Pemerintahan Erdogan pada demonstran Taksim Gezi Park menjadi awal retaknya aliansi Erdogan dan Gulen, lalu pengungkapan skandal korupsi yang dilakukan oleh Partai AKP dan afiliasi menandai secara resmi aliansi Partai AKP dan *Gulenist* berakhir. Setelah berakhirnya aliansi AKP-*Gulenist*, pasca terjadinya upaya kudeta 15 Juli 2016 oleh faksi militer, pada bulan Mei 2016 Pemerintah Turki secara resmi mengklasifikasikan *Gulenist* sebagai organisasi teroris dengan nama *Fethullahçı Terör Örgütü/Fethullah Teror Organization* (FETO). Fethullah Gulen menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya sebagai aktor di balik kudeta 15 Juli 2016, Fethullah Gulen yang merupakan pemilik *Green Card* tetap tinggal dan mengasingkan diri di pedalaman Pennsylvania, Amerika Serikat.

Hubungan Amerika Serikat Dan Turki Serta Kebijakan Ekstradisi Amerika Serikat
Amerika Serikat dan Turki memiliki sejarah hubungan diplomatik yang cukup panjang, hubungan diplomatik antara AS dan Turki dimulai pada tahun 1831 ketika Turki masih berbentuk Kesultanan Utsmani lalu saat kedua negara memasuki Perang Dunia-1 sebagai poros yang saling berlawanan, hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terputus, ketika Kesultanan Utsmani runtuh dan digantikan oleh Republik Turki, Amerika Serikat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Turki pada tahun 1927.

Setelah berdirinya Republik Turki yang dinilai sebagai suatu institusi yang demokratis, hubungan antara Turki dan Amerika Serikat semakin berkembang. Pada tahun 1947

Turki dan Amerika Serikat menyetujui Economic and Technical Cooperation yaitu sebuah implementasi atas program Truman Doctrine yang merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membangun perekonomian negara-negara sekutu Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, hal tersebut memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Turki tidak hanya secara ekonomi dalam bidang militer pun kedua negara tersebut semakin mengikat ketika pada tahun 1952 Turki bergabung kepada NATO (North Atlantic Treaty Organization) sebuah organisasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang bertujuan sebagai sistem pertahanan kolektif bagi Amerika Serikat dan sekutunya, hal tersebut menjadikan Turki sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang cukup diperhitungkan.

Republik Turki dan Amerika Serikat baru menyetujui perjanjian ekstradisi setelah 52 tahun dimulainya hubungan diplomatik yaitu pada 7 Juni 1979 di kota Ankara. Tidak lama setelah menyetujui perjanjian di Ankara pada tanggal 2 Agustus 1979 Presiden AS pada saat itu Jimmy Carter meratifikasi perjanjian tersebut setelah disetujui oleh 2/3 anggota Senat Amerika Serikat. Pihak Turki sendiri meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 21 November 1980, lalu pada 1 Januari 1981 perjanjian tersebut telah berlaku bagi kedua negara. Dalam perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Turki menyetujui bahwa adanya syarat-syarat atas penolakan ekstradisi yang tercantum pada Perjanjian Ekstradisi antara AS dan Turki pada Artikel ke-4 mengenai syarat penolakan ekstradisi yaitu:

1. Ekstradisi dapat ditolak jika, *The Requested State* menilai subjek ekstradisi melakukan pelanggaran politik dan sejenisnya, lalu subjek merupakan seorang korban persekusi atas opini atau pemikiran politiknya. Namun pelanggaran terhadap kepala negara dan anggota keluarganya bukanlah sebuah pelanggaran politik.
2. Jika pelanggaran yang dilakukan adalah murni pelanggaran militer dan bukan pelanggaran hukum biasa.
3. Jika subjek menyerahkan diri dan telah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara "*The Requested State*".
4. Jika subjek memiliki kekebalan hukum dibawah hukum negara peminta maupun diminta.
5. Jika subjek melakukan pelanggaran di wilayah negara "*The Requested State*" maka otoritas hukum setempat yang berwenang untuk mengadili subjek tersebut.
6. Jika subjek telah diberi amnesti oleh salah satu pihak dari "*The Requested State*" maupun "*The Requesting State*".
7. Jika subjek telah diadili oleh pihak ketiga atas pelanggaran yang sama.

Amerika Serikat sebagai pihak *The Requested State* menerapkan kebijakan ekstradisi *Political Offense Exception*. Kebijakan tersebut memungkinkan Amerika Serikat melindungi objek ekstradisi yang dinilai sebagai seorang pelanggar politik yang mencari suaka atas dasar pelanggaran yang dilakukan objek tersebut adalah hal yang merupakan dari pemikiran politiknya atau objek merupakan korban persekusi politik dari negara asalnya. Untuk dapat menilai ekstradisi merupakan seorang pelanggar politik atau bukan, Amerika Serikat melalui Mahkamah Agung atas rekomendasi *Secretary State* yang bertanggung jawab pada Presiden dapat menyelenggarakan mekanisme peradilan *Political Incident Test*.

(Lubet, Steven dan Morris Czakes, 1980.)

Pertimbangan Untung dan Rugi Penolakan Amerika Serikat Berdasarkan Indikator Dalam Teori Pilihan Rasional

Amerika Serikat dan Turki merupakan negara yang telah saling menyepakati perjanjian ekstradisi pada tahun 1979 dan berlaku sejak tahun 1981. Perjanjian ekstradisi yang telah disepakati tersebut merupakan sebuah acuan dasar bagi kedua negara ketika hendak melakukan ekstradisi, maka kedua negara harus menghormati aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati sejak tahun 1979 tersebut.

Dalam kasus permohonan ekstradisi oleh Turki untuk meminta diekstradisinya Fethullah Gulen kepada Amerika Serikat, Amerika Serikat berpotensi melanggar perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang tertuang dalam Artikel ke-3 no.1 yaitu ekstradisi dapat ditolak jika, *The Requested State* (Amerika Serikat) menilai objek ekstradisi melakukan pelanggaran politik dan sejenisnya, lalu objek merupakan seorang korban persekusi atas opini atau pemikiran politiknya, dalam syarat penolakan tersebut dapat dianalisa bahwa Amerika Serikat mengklaim bahwa Fethullah Gulen yang merupakan objek ekstradisi hanya melakukan pelanggaran yang bersifat politis terlebih Amerika Serikat juga mengklaim bahwa tidak ada bukti keterlibatan Fethullah Gulen dalam pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, sedangkan bagi pihak *The Requesting State* yaitu Turki meyakini bahwa Fethullah Gulen merupakan sosok yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kudeta 15 Juli 2016.

Hal yang menguatkan latar belakang politik yang terdapat dalam kasus ekstradisi Fethullah Gulen adalah bahwa sejarah hubungan antara Pemerintah berkuasa Turki dan Fethullah Gulen serta pengikutnya, dimana Fethullah Gulen dan Gulenist yang merupakan salah satu kontributor terbesar lalu menjadi musuh politik dalam karir politik Recep Tayyip Erdogan yang tengah berkuasa sebagai Presiden Turki. Fethullah Gulen selama berkuasanya Partai AKP di Pemerintahan Turki kerap menyuarakan aspirasi yang bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah selain itu Fethullah Gulen dan para pengikutnya atau Gulenist mampu mengungkap skandal korupsi Partai AKP yang melibatkan kedua anak dari Erdogan.

John Kerry selaku Sekretaris Negara pada saat Turki mengajukan permohonan ekstradisi tersebut meyakini bahwa aksi *The Purge* usai kudeta 15 Juli 2016 adalah justifikasi untuk membersihkan lawan politik pemerintah yang berkuasa, itulah mengapa kasus ekstradisi ini sarat akan latar belakang politis, dimana dalam konsep ekstradisi sendiri juga terdapat definisi mengenai penolakan ekstradisi yaitu bahwa, penolakan ekstradisi karena adanya sangkaan yang cukup kuat, permintaan ekstradisi ditolak jika menurut *The Requested State* objek ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang berkaitan dengan agama, keyakinan politik atau karena ia termasuk dalam suku bangsa tertentu.

(M. Budiarto, 1980)

Maka berdasarkan konsep ekstradisi, permohonan ekstradisi oleh Turki kepada Amerika Serikat merupakan bentuk pelanggaran ekstradisi yang tercantumpada artikel-3 no.1 yang menyatakan adanya larangan ekstradisi yang bersifat politis, dimana Amerika Serikat meyakini bahwa ekstradisi tersebut adalah hal yang bersifat politis, dalam konsep ekstradisi Amerika Serikat sebagai *The Requested State* memiliki kapasitas untuk menunda dan menolak jika *The Requested State* itu sendiri menilai permohonan tersebut bersifat politis.

Untung dan ruginya suatu keputusan yang diambil Amerika Serikat tentunya menjadi suatu dasar dalam menentukan kebijakannya selaku aktor rasional. Namun dalam isu ekstradisi Fethullah Gulen yang tengah dihadapi oleh Amerika Serikat selaku pihak *The Requested State*, Amerika Serikat mempolitisasi mekanisme normatif prinsip kebijakan ekstradisi yang diterapkannya yaitu prinsip *Political Offenders Exception*. Dimana secara normatif Amerika Serikat seharusnya melakukan mekanisme *Political Incident Test* untuk menentukan legalitas status *Political Offenders* objek ekstradisi dalam kasus ini ialah Fethullah Gulen. Namun Amerika Serikat tidak menyelenggarakan mekanisme *Political Incident Test*.

Jika diselenggarakannya *Political Incident Test* maka jika terbukti Fethullah Gulen merupakan pelanggar politik Amerika Serikat berhak dan berkewajiban melindungi Fethullah Gulen. Tidak diselenggarakannya mekanisme tersebut adalah demi keuntungan dan memaksimalkan opsi yang dimiliki Amerika Serikat sebagai aktor rasional secara indikator *Power Activation*.

Dalam pembahasan diatas dapat dianalisa melalui penjabaran benefit yang diperoleh Amerika Serikat atas keputusan yang diambilnya beserta opsi yang dimilikinya, yaitu:

1. Amerika Serikat dihadapkan pada 2 opsi yaitu untuk mengekstradisi atau tidak. Walaupun tidak memiliki keuntungan yang signifikan pada 2 opsi tersebut, namun secara indikator *Power Determinism* opsi terbaik yang dapat dimaksimalkan adalah untuk tidak mengekstradisi. Pilihan tersebut membuat Amerika Serikat terhindar dari citra buruk yang akan membuat Amerika Serikat terlihat berkontribusi dalam *The Purge* yang banyak dikecam oleh berbagai pihak secara luas.
2. Jika Amerika Serikat berkontribusi dalam aksi *The Purge* yang dilancarkan oleh Pemerintahan AKP, maka Amerika Serikat akan berkontribusi dalam prosesi pelemahan lawan politik Pemerintahan AKP melalui *The Purge* yang dipercaya Amerika Serikat sebagai justifikasi Pemerintahan AKP.
3. Amerika Serikat akan melanggar perjanjian ekstradisi yang tertuang pada Artikel ke-3 No.1 jika memilih opsi ekstradisi. Maka selain akan melanggar prinsip-prinsip normatif ekstradisi, Amerika Serikat juga tidak akan bisa memaksimalkan opsi ini dikarenakan Amerika Serikat telah menyerahkan Fethullah Gulen yang merupakan variabel *Power* dalam indikator *Power Determinism* bagi Amerika Serikat terhadap Turki. Amerika Serikat memilih untuk menolak karena Fethullah Gulen suatu waktu dapat diekstradisi oleh Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat tidak berhak atau berkewajiban untuk melindungi Gulen selama belum diberlakukannya mekanisme *Political Incident Test*.
4. Status pelanggar politik Fethullah Gulen yang belum dilegalisasi ataupun dibuktikan melalui mekanisme normatif *Political Incident Test* yang belum diselenggarakan oleh Amerika Serikat selaku *The Requested State* secara konsep ekstradisi, membuka peluang bagi Amerika Serikat agar sewaktu-waktu Amerika Serikat dapat menukar Fethullah Gulen kepada Turki demi menciptakan suatu keadaan kooperatif. Dalam hal ini peran Amerika Serikat secara indikator *power activation* dalam teori pilihan rasional adalah untuk menyediakan kapabilitas ofensif untuk menciptakan keadaan kooperatif maupun konflik terhadap Turki dengan memanfaatkan Fethullah Gulen sebagai variabel *Power* dalam *Power Activation* Amerika Serikat.

Kesimpulan

Upaya kudeta 15 Juli 2016 yang dilakukan oleh faksi militer terhadap presiden Recep Tayyip Erdogan menyebabkan penangkapan secara massif terhadap pihak-pihak yang dianggap pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dengan diberlakukannya *State of Emergency* di Turki maka Pemerintah memiliki wewenang untuk menangkap siapapun yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Sebanyak 150.000 surat penangkapan diterbitkan oleh Pengadilan Turki lalu penangkapan tersebut berujung pada klaim Pemerintah Turki yang meyakini bahwa dalang atau tokoh intelejen yang berperan menggerakkan di balik peristiwa kudeta tersebut adalah Fethullah Gulen, aliansi lama Partai AKP dan Fethullah Gulen seorang ulama berpengaruh yang menetap di pedalaman Pennsylvania, Amerika Serikat yang memiliki pengaruh yang cukup kuat atas koneksi dan pengikutnya di Turki dengan perkiraan total 3-6 juta pengikut aktif yang tergabung sebagai *hizmet* atau *gülenist* lalu pasca tuduhan Pemerintah Turki atas keterlibatan disebut sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Turki yaitu sebagai FETO (*Fetullahci Teror Orgutu/Fethullah Teror Organization*) dan Turki secara resmi telah melakukan permohonan ekstradisi Fethullah Gulen kepada Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Buku

J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Aksara Persada

M. Budiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia.

Internet

BBC NEWS : Turkey's Request Extraditions over Fethullah Gulen
<https://www.bbc.com/news/world-europe-36833972>

CNN : *47,155 arrests: Turkey's post-coup crackdown by the numbers*.
<http://edition.cnn.com/2017/04/14/europe/turkey-failed-coup-arrests-detained/index.html>

The Guardian : Turkey's Request Extradition over Fethullah Gulen
<https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/turkey-fethullah-gulen-extradition-request-joe-biden-erdogan>.

TRT WORLD : *How Did Erdogan Handle The Coup on TheNight of 15 July ?*
<https://www.trtworld.com/turkey/how-did-erdogan-handle-the-coup-on-the-night-of-july-15--8759>

Jurnal

Fabio Vicini, 2014, *The Irrepressible Charm of the state : Dershanes Closures and The Domestic War for Power in Turkey*, Mayis University.

Lubet, Steven dan Morris Czakes, 1980, *Journal of Criminal Law and Criminology : The Role of American Judiciary in The Extradition of Political Terrorist*, Vol.71, Issue. 3, Article 2, Northwestern University of Law.

Rabasa,Angel dan Stephen F. Larabee, 2008, *The Rise of Political Islam in Turkey*, RAND Corporation.

Sarah El-Kazaz, 2015, *Middle East Brief : The AKP and The Gulen : The End of A Historic Alliance*, Brandeis University.